

KAJIAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BAHARI PANTAI HUNIMUA KABUPATEN MALUKU TENGAH

**Oleh:
Deny Yarusain Amin**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsep pengembangan obyek wisata bahari Pantai Hunimua.. Konsep pengembangan ini disusun berdasarkan menggunakan metode/analisis SWOT (strength/kekuatan, weakness/kelemahan, opportunity/kesempatan, threatment/ancaman) yang diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan factor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi perkembangan obyek wisata ini. Selanjutnya membandingkan kedua faktor tersebut untuk mendapatkan strategi pengembangan yang dijabarkan dalam program-program strategis. Strategi ini kemudian dirumuskan ke dalam bentuk beberapa kebijakan yang akan dijadikan sebagai arah pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan responden. Wawancara juga disertai dengan kuesioner. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sektor pariwisata di daerah ini antara lain : masyarakat, LSM, perguruan tinggi (PT), DPD ASITA, Kantor Kecamatan Salahutu, DPR, BAPPEDA, BAPEDALDA, Dinas Pariwisata.. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengembangan obyek wisata bahari Pantai Hunimua dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang dirumuskan dalam empat kebijakan yaitu peningkatan kualitas produk wisata, peningkatan peran pemangku kepentingan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta peningkatan kualitas SDM.

Kata kunci : Keterpaduan, Keberlanjutan, SWOT

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia wilayah pesisir memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam konteks perekonomian bangsa. Sehingga banyak aktifitas pembangunan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam dilakukan di wilayah pesisir seperti: kegiatan perikanan, pariwisata, transportasi, kegiatan industri, pertambangan dan pertanian. Keberadaan keanekaragaman potensi sumber daya alam di wilayah ini pada akhirnya menjadikan wilayah pesisir sebagai wilayah yang sangat diminati oleh berbagai stakeholder. Hingga saat ini sekitar 60% dari penduduk di Indonesia mendiami wilayah pesisir. Dan sebagian besar kota-kota besar di Indonesia juga terletak di wilayah pesisir. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, kenyataannya juga terdapat isu/permasalahan yang cukup serius di wilayah pesisir pertama; kemiskinan terutama pada nelayan. Di Indonesia 25% dari jumlah masyarakat miskin berada di wilayah pesisir. Kedua; ekstraksi yang berlebihan pada lahan atas (daratan) atau maupun lahan bawah

(perairan) menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan seperti pencemaran (sampah, limbah industry), erosi, sedimentasi dan permasalahan ketiga adalah terjadi konflik kepentingan antar stakeholder/sektoral. Adanya isu/permasalahan tersebut mendorong pemerintah terkait untuk dapat mengimplementasikan kebijakan (strategi) pembangunan yang tepat di wilayah pesisir.

Indonesia merupakan negara yang memiliki 17504 buah pulau, dan garis pantai sepanjang 81.000 km, sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata. Berdasarkan potensinyakegiatan pariwisata terus diarahkan untuk mendorong pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataandiharapkan dapat memberikan pengaruh pada perkembangan perekonomian masyarakat. Menurut Tuwo (2011) peluang dari pengembangan pariwisata antara lain : (1) meningkatkan jumlah wisatawan; (2) meningkatkan lama tinggal wisatawan agar masyarakat lokal mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menjual produk lokal dan jasa; (3) menarik pangsa pasar wisatawan agar terjadi peningkatan daya beli terhadap produk lokal; (4) meningkatkan jumlah pembelian wisatawan melalui penawaran produk lokal yang lebih beragam; (5) menyediakan penginapan lokal untuk meningkatkan perolehan masyarakat dari biaya penginapan dan makan-minum. (6) memberikan jasa panduan dan layanan lainnya kepada wisatawan melalui pelibatan masyarakat; (7) mendorong kegiatan atraksi (daya Tarik) lokal berupa festival budaya lokal dan; (8) penyediaan makanan dan minuman (kuliner) tradisional.

Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 581.376 km², luas lautan seluas 527.191 km² dan daratan 54.185 km². Berdasarkan karakteristik ini maka Provinsi Maluku juga memiliki potensi pariwisata bahari yang tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. Banyak obyek wisata bahari di Maluku yang juga sudah menjadi destinasi wisata diantaranya Pantai Natsepa, Pantai Pasir Panjang, Pantai Hunimua, Pantai Latuhalat dan obyek wisata lainnya. Namun Pantai Hunimua merupakan obyek wisata memiliki jumlah pengunjung paling tinggi. Dari waktu ke waktu cenderung bertambah. Obyek wisata ini terletak di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah. Sejumlah atraksi wisata yang dapat dinikmati di sini antara lain pemandangan alam, pantai pasir putih, pemandangan alam bawah laut dan keanekaragaman biotanya, aktifitas memancing, serta potensi atraksi budaya daerah.

Meskipun demikian pengelolaanobyek wisata ini dirasakanmasih belum optimal karena atraksi (daya Tarik) wisatanya belum didukung dengan fasilitas wisata yang memadai seperti petugas keamanan, penginapan, rumah makan, toko souvenir, wahana bermain, dan fasilitas penting lainnya. Bahkan beberapa fasilitas lain yang sudah ada sebelumnya mengalami rusak berat. Sehingga terkesan pengelolaan obyek wisata ini seperti hanya mengejar keuntungan (profit oriented) tanpa memperhatikan keberlanjutan pengembangannya. Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Kajian Pengembangan Obyek Wisata Bahari Pantai Hunimuadi Kabupaten Maluku Tengah.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana menentukan kebijakan/strategi pengembangan wisata bahari Pantai Hunimuayang sesuai dengan kondisi saat ini

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan

Laju pertumbuhan yang tinggi serta pesatnya pembangunan di wilayah pesisir, menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut. Banyak kegiatan pemanfaatan cenderung bersifat sangat ekstraktif yang didominasi oleh kepentingan atau pertimbangan ekonomi saja. Selain itu banyak perencanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dari tiap sektoral yang saling tumpah tindih sehingga dapat memicu konflik kepentingan. Karena itu dalam kegiatan pembangunan wilayah pesisir perlu diterapkan prinsip keterpaduan dan berkelanjutan. Pengertian pokok keterpaduan adalah untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktifitas dari dua sektor atau lebih dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir.. Sustainability atau keberlanjutan adalah mewarisi generasi penerus dengan dengan warisan yang kaya akan stok ilmu pengetahuan dan pemahaman, stok teknologi, stok modal karya manusia dan stok asset lingkungan, tidak kurang dari yang diwarisi oleh generasi sekarang.

Pembangunan berkelanjutan sebagai suatu paradigma baru pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu terhadap pembangunan yang menggabungkan tiga pilar yaitu : (a) secara ekonomiberhubungan dengan asas biaya dan manfaat, sehingga manfaatnya harus lebih besar daripada dampaknya. (b). Secara sosial berarti merefleksikan hubungan interaksi antara pembangunan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Suatu aktivitas secara sosial berkesinambungan, bila dapat berintegrasi dengan norma sosial atau tidak bertolak belakang dengan toleransi masyarakat terhadap perubahan. Sistem sosial berkelanjutan harus dapat mencapai kesamaan distribusi, penyediaan pelayanan sosial termasuk kesehatan dan pendidikan, serta akuntabilitas dan partisipasi. (c). Berkelanjutan secara ekologi, mengandung pengertian untuk tetap menjaga manusia dan spesies lain yang berinteraksi dengannya, sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga mampu meningkatkan mutu kehidupan. Sedangkan Dahuri et al, (1996) dalam Tuwo (2011) menguraikan lima alasan yang mendasari pentingnya pengelolaan secara terpadu, yaitu: pertama, secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis atau hubungan fungsional, baik antara ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Kedua, dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu jenis sumberdaya alamiah, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Ketiga, dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki ketrampilan dan kesenangan bekerja yang berbeda. Seperti nelayan, pendamping pariwisata, kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Keempat, baik secara ekologis maupun ekonomis pemanfaatan kawasan pesisir secara monokultur atau single use sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Kelima, kawasan pesisir merupakan sumberdaya milik bersama yang dapat digunakan oleh siapa saja, dimana setiap pengguna sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Menurut Budiharsono (2005) dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan pembangunan wilayah terpadu sekurang-kurangnya perlu memperhatikan enam aspek yang menjadi pilar pembangunan wilayah, yaitu : (1) aspek biogeofisik, meliputi kandungan sumberdaya hayati, sumberdaya nirhayati, jasa-jasa

kelautan maupun sarana prasarana yang ada di wilayah pesisir dan lautan. (2) aspek ekonomi, meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan. (3) aspek sosial budaya, politik dan keamanan pertahanan meliputi kependudukan, kualitas sumber daya manusia, pariwisata (dalam bidang politik), budaya masyarakat pesisir dan lautan serta pertahanan dan keamanan. (4) aspek kelembagaan, meliputi kelembagaan masyarakat yang ada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan apakah kondusif atau tidak, baik berupa property right atau, teritorial use right, entitlement, indigenous knowledge maupun kelembagaan lokal lainnya. (5) aspek lokasi, meliputi ruang (spasial) yang berkaitan dimana dimana komoditi kelautan diproduksi dan bagaimana memperoleh sarana produksi, diolah maupun dipasarkan. (6) aspek lingkungan meliputi kajian bagaimana proses produksi mengambil input dari ekosistem, apakah merusak atau tidak.

Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan jenis kegiatan pariwisata yang berlandaskan pada daya tarik kelautan. Daya tarik itu mencakup kekayaan bahari, peristiwa-peristiwa yang diselenggarakan di laut dan di pantai, seperti: lomba layar, memancing, selancar, menyelam, olah raga pantai, dayung, adat istiadat dan budaya bahari masyarakat pesisir. Cakupan kegiatan wisata ini memiliki spektrum industri yang sangat luas dan bisnis yang ditawarkan sangat beragam, antara lain jasa penyedia transportasi, kapal pesiar, pengelola pulau kecil, pengelola taman laut, hotel restoran terapung kawasan lepas pantai, rekreasi pantai, dan sebagainya. Tentunya industri-industri pendukung juga akan terbuka lebar antara lain, jasa pakaian dan olah raga, kacamata, foto, video, pakaian dan peralatan olah raga, jasa kesehatan, jasa keamanan laut, jasa rescue, kerajinan cendera mata, pemasok makanan dan minuman, bendaposa, dan sebagainya. Konsep wisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan adat istiadat dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam pembangunan kelautan khususnya pengembangan pariwisata bahari juga terdapat permasalahan mendasar antara lain: (a). kurangnya prasarana dan sarana pariwisata yang memadai pada kawasan wisata yang mempunyai potensi akan tetapi belum berkembang sehingga membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana wisata yang memadai. (b). rendahnya kualitas SDM pelaku pembangunan pariwisata bahari. (c). konflik pemanfaatan ruang pesisir yang mengakibatkan wilayah pesisir dieksploitasi tidak sebagaimana mestinya sehingga mengalami degradasi fisik, pencemaran dan eksploitasi yang berlebihan. (d). rendahnya kegiatan promosi dan terbatasnya informasi tentang potensi wisata.

Analisa SWOT

Perumusan strategi pengembangan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan analisa strategis melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Secara sistematis bermakna bahwa kajian aspek-aspek selalu didasarkan pada lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi faktor kekuatan/potensi (strength) dan kelemahan (weakness). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi faktor peluang (opportunity) dan tantangan/ancaman (threat). Secara terstruktur langkah-langkah perumusan strategi pengembangan selalu diawali dengan mengidentifikasi dan mengkaji faktor internal dan eksternal kemudian mengkawinsilangkan kedua faktor tersebut untuk mendapatkan skor (nilai) yang akan memberikan kesimpulan tentang pengaruh kegiatan

terhadap pengelolaan sumber dayayang optimal kemudian dilanjutkan dengan menyusun kebijakan/strategi.

METODOLOGI PENELITIAN

Strategi pengembangan obyek wisata bahari Pantai Hunimua dirumuskan menggunakan metode/analisis SWOT (strength/kekuatan, weakness/kelemahan, oppportunity/kesempatan, threatment/ancaman). Yang diawali dengan mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor internal(kekuatan dan kelemahan) dan factor-faktor eksternal(peluang dan ancaman) yang mempengaruhi perkembangan obyek wisata ini. Selanjutnya membandingkan kedua faktor tersebut untuk mendapatkan strategi pengembangan yang dijabarkan dalam program-program strategis. Strategipengembangan ini kemudian dirumuskan ke dalam bentuk beberapa kebijakan yang akan dijadikan sebagai arah pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua.Dalam penelitian ini data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara yang mendalam dengan responden. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sampel yang pilih dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang mempunyai peran dalam membuat kebijakan pembangunan khususnya berkaitan dengan sektor pariwisata di daerah ini antara lain : tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi (PT), DPD ASITA, Kantor Kecamatan Salahutu, Pemerintah Provinsi Maluku (DPR, BAPPEDA,BAPEDALDA, Dinas Pariwisata)

HASIL

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, wawancara (kuesioner) dengan responden maka dapat dideskripsikan faktor-faktor internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap faktor-faktor tersebut seperti pada tabel di bawah.

Tabel 4.a.Pembobotan Faktor Internal (Internal Factor Analysis Strategy/IFAS)

Kode	Komponen SWOT	Bobot	Rating	Skor
	Faktor Internal			
S	Kekuatan (Strenght)			
S1	Mempunyai daya tarik pantai dan laut yang indah	0,10	4	0,40
S2	Aksesibilitas dan prasarana umum yang menunjang kegiatan wisata	0,09	3	0,27
S3	Ragam budaya dan adat istiadat masyarakat yang terbuka	0,09	3	0,27
S4	Tersedianya sumber daya manusia	0,08	3	0,24
S5	Komitmen stakeholder terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua	0,09	4	0,36
	Sub Jumlah	0,45		1,54
W	Kelemahan (Weakness)			
W1	Minimnya fasilitas yang mendukung kegiatan wisata	0,11	1	0,11
W2	Daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal	0,10	2	0,20
W3	Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah	0,10	2	0,20
W4	Minimnya pemberdayaan masyarakat untuk pariwisata	0,09	2	0,18
W5	Permasalahan kepemilikan lahan wisata	0,15	1	0,15
	Sub Jumlah	0,55		0,84
	Jumlah	1		2,38

Tabel 4.b.Pembobotan Faktor Eksternal ((Eksternal Factor Analysis Strategy/EFAS)

Kode	Faktor Eksternal			
O	Peluang (Opportunity)	Bobot	Rating	Skor
O1	Minat wisata bahari di dunia semakin meningkat	0,07	4	0,28
O2	Minat investor terhadap pengembangan Pantai Hunimua	0,08	3	0,24
O3	Meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara ke Maluku	0,08	3	0,24
O4	Program pemerintah yang mendukung pengembangan kepariwisataan nasional	0,10	4	0,40
O5	Pengembangan bandara international Pattimura sebagai Gerbang Pariwisata di Provinsi Maluku	0,08	3	0,24
Sub Jumlah		0,41		1,4
T	Ancaman (Threatment)	Bobot	Rating	Skor
T1	Persaingan bisnis pariwisata di tingkat regional dan internasional semakin meningkat	0,08	2	0,16
T2	Tergerusnya usaha ekonomi kecil karena pemodal besar	0,13	2	0,26
T3	Degradasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat karena budaya luar	0,13	2	0,26
T4	Kondisi keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi iklim investasi di daerah	0,11	2	0,22
T5	Menurunnya daya tarik wisata karena dampak pembangunan fasilitas dan aktifitas wisata	0,12	2	0,24
Sub Jumlah		0,59		1,14
Jumlah		1		2,54

Sumber : Hasil Pengolahan

Angka ini (skor) masing-masing faktor kemudian diolah dengan memperhatikan urutan prioritas skor dengan menggabungkan atau menjumlahkan skor faktor internal dan skor faktor eksternal untuk mendapatkan prioritas strategi pengembangan. Berdasarkan penjumlahan tersebut, selanjutnya dipilih 5 strategi yang dimulai dengan skor tertinggi sampai terendah untuk dianalisis menjadi prioritas kegiatan atau program pengembangan. Rangkings pertama pada kuadran I adalah strategi S1-O4, pada kuadran II adalah strategi S1-T2,T3, pada kuadran III, strategi W2,W3-O4 dan pada kuadran IV, strategi W2,W3-T2. Perumusan strategi pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua dengan metode SWOT dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Strategi Pengembangan Obyek Wisata Bahari Panta Hunimua

EKSTERNAL	PELUANG (O)	SKOR	ANCAMAN (T)	SKOR
	1. Minat wisata bahari di dunia semakin meningkat 2. Minat investor terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua 3. Maningkatnya kunjungan wisatawan manca negara ke Maluku. 4. Program pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata nasional 5. Pengembangan bandara international PATTIMURA sebagai Gerbang Pariwisata		1. Persaingan bisnis pariwisata di tingkat regional dan internasional semakin kuat 2. Tergerusnya usaha ekonomi kecil karena pengusaha besar 3. Degradasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat karena budaya luar 4. Kondisi keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi iklim investasi di daerah. 5. Menurunnya daya tarik wisata karena dampak pembangunan fasilitas dan aktifitas wisata	

	di Provinsi Maluku					
INTERNAL						
KEKUATAN (S)						
1. Daya tarik pantai dan laut yang indah	1. Penyelenggaraan event bahari bertaraf nasional dan internasional	S1-O4	0,80	1. Pengawasan terhadap kegiatan wisata yang berdampak negatif terhadap masyarakat	S1-T2,T3	0,66
2. Aksesibilitas dan prasarana umum yang menunjang kegiatan wisata	2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder	S5-O4	0,76	2. Pengembangan daya tarik berbasis budaya lokal	S2-T3	0,66
3. Ragam budaya dan adat istiadat masyarakat yang terbuka	3. Peningkatan promosi wisata	S1-O1	0,68	3. Monitoring dampak negatif kegiatan wisata terhadap lingkungan	S1,S2-T5	0,64
4. Tersedianya sumber daya manusia	4. Peningkatan kualitas aksesibilitas dan fasilitas umum	S2,S3-O4	0,67	4. Peningkatan keamanan di obyek wisata	S1,S2-T4	0,62
5. Komitmen stakeholder terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua	5. Peningkatan iklim investasi melalui Insentif dan Penyederhanaan prosedur investasi	S1-O2,O3,O5	0,64	5. Keberpihakan kepada Masyarakat Lokal	S5-T2,T3	0,62

Lanjutan ..

EKSTERNAL	PELUANG (O)	SKOR	ANCAMAN (T)	SKOR
	1. Minat wisata bahari di dunia semakin meningkat 2. Minat investor terhadap pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua 3. Maningkatnya kunjungan wisatawan manca negara ke Maluku. 4. Program pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata nasional 5. Pengembangan bandara international PATTIMURA sebagai Gerbang Pariwisata di Provinsi Maluku		1. Persaingan bisnis pariwisata di tingkat regional dan internasional semakin kuat 2. Tergerusnya usaha ekonomi kecil karena pengusaha besar 3. Degradasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat karena budaya luar 4. Kondisi keamanan dan ketertiban yang mempengaruhi iklim investasi di daerah. 5. Menurunnya daya tarik wisata karena dampak pembangunan fasilitas dan aktifitas wisata	

INTERNAL						
KELEMAHAN (W)						
1. Minimnya fasilitas pendukung mendukung kegiatan wisata	1. Pengembangan Budaya lokal Sebagai Atraksi Wisata	W2,W 3-O4	0,60	1. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal	W2,W3 -T2	0,46
2. Daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal.	2. Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk bidang pariwisata	W4- O4	0,58	2. Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan budaya	W4- T2,T3	0,44
3. Kualitas sumber daya manusia masih rendah	3. Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan	W5- O4	0,55	3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan dan ketertiban	W3-T4	0,42
4. Minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata	4. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas wisata	W1- O4	0,51	4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan	W4-T5	0,42
5. Permasalahan lahan wisata	5. Pengembangan kreatifitas masyarakat melalui pembentukan lembaga budaya	W2,W 3-O1	0,48	5. Standarisasi Produk Wisata	W5- T2,T3	0,41

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 5. Matriks Strategi SWOT maka strategi pengembangan dapat disusun (dikelompokkan) ke dalam beberapa kebijakan dan yang kemudian dituangkan secara garis besar ke dalam Rencana Tindak Lanjut seperti dalam Tabel 6.

Tabel 6. Kebijakan Dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Obyek Wisata Pantai Hunimua Dalam Rangka Pembangunan Kepariwisataan Berkelanjutan Dalam 10 Tahun

A. Pengembangan Kualitas Produk Wisata				
Strategi	Instansi Terkait/ Penanggung Jawab	Prioritas	Waktu (Tahun)	Sumber Dana
<i>Strategi A-1 : Penyelenggaraan event bahari</i>		1	10	APBN/APBD
• Pelaksanaan Festival Pantai Hunimua : - Festival kuliner (makan patita), lomba perahu tradisional (manggurebe arumbae), Lomba mancing, Karnaval/pameran budaya	Disbudpar, Dishub,Diknas, DKP, Swasta			
<i>Strategi A-2 : Peningkatan Promosi Wisata</i>		2	10	APBN/APBD
• Membuat paket wisata, Kerjasama dengan ASITA, PHRI, dll, promosi lewat internet, Regulasi khusus untuk wisatawan asing	Disbudpar, Asosiasi Wisata			
<i>Strategi A-3: Peningkatan Kualitas Aksesibilitas dan Fasilitas Umum</i>		3	3	APBN/APBD
• Adanya kendaraan umum rute Ambon - Pantai Hunimua, Penyediaan air bersih dan energi listrik, Penambahan unit MCK	Dishub, Dinas PU, PT PLN, PDAM			
<i>Strategi A-4: Pembangunan Obyek Wisata Berbasis Budaya Lokal</i>		4	10	APBN/APBD
• Implementasi corak/ragam arsitektur daerah pada pembangunan obyek wisata	Disbudpar, BAPPEDA, LSM			

B. Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder)				
Strategi	Instansi Terkait/ Penanggung Jawab	Prioritas	Waktu (Tahun)	Sumber Dana
<i>Strategi B-1: Peningkatan Kerjasama Dan Koordinasi Antar Stakeholder</i>		1	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk mengikuti pameran dalam dan luar negeri, Mengundang pihak swasta untuk pembangunan fasilitas wisata 	Pemerintah Pusat, Disbudpar, BPM, Disperindag			
<i>Strategi B-2 : Pengawasan Terhadap Kegiatan Wisata Yang Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat</i>		2	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kegiatan pelaku usaha dan wisatawan di obyek wisata 	Disbudpar, Diknas, LSM, Dinas Koperasi, Disperindag			
<i>Strategi B-3: Peningkatan Iklim Investasi Melalui Insentif Dan Penyederhanaan Prosedur Investasi</i>		3	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong investasi swasta melalui insentif dan penyederhanaan prosedur investasi 	Disbudpar, BPM, Perpajakan,			
<i>Strategi B-4: Fasilitasi Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)</i>		4	2	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) 	Disbudpar,, DPD ASITA, PHRI,			
C. Monitoring Dan Pengendalian Lingkungan				
Strategi	Instansi Terkait/ Penanggung Jawab	Prioritas	Waktu (Tahun)	Sumber Dana
<i>Strategi C-1: Monitoring Dampak Kegiatan Wisata Terhadap Lingkungan</i>		1	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring lokasi wisata • Menentukan lokasi yang diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas wisata • Penelitian lanjutan 	Disbudpar, BAPEDALDA, Perguruan Tinggi, LSM			
<i>Strategi C-2: Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kelestarian Lingkungan</i>		2	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan/penyuluhan tentang lingkungan • Kegiatan ilmiah : seminar, diskusi lingkungan 	Disbudpar, PT, BAPEDALDA			
<i>Strategi C-3: Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Obyek Wisata</i>		3	2	APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim mediasi penyelesaian sengketa lahan. 	Disbudpar, Kepolisian, BPN, Masyarakat			
D. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)				
Strategi	Instansi Terkait/ Penanggung Jawab	Prioritas	Waktu (Tahun)	Sumber Dana
<i>Strategi D-1: Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Bidang Pariwisata</i>		1	10	APBN/APBD
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan ilmiah mengenai dampak 	Disbudpar,			

kegiatan kepariwisataan bagi masyarakat • Pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan (bahasa inggeris, kuliner	Disperindag, Dinas Sosial, dinas Koperasi			
<i>Srtategi D-2: Pengembangan Kreatifitas Masyarakat Melalui Pembentukan Lembaga Budaya</i>		2	2	APBD/Swaday a
• Fasilitasi pembentukan sanggar-sanggar seni dan budaya	Disbudpar, Diknas Masyarakat			
<i>Strategi D-3: Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal</i>		3	10	APBN/APBD
• Kearifan lokal sebagai daya tarik wisata • Jasa pijat tradisional • Pengembangan bakat bahari(pemandu wisata	Disbudpar, Masyarakat, DKP			
<i>Strategi D-4: Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Budaya</i>		4	3	APBN/APBD
• Kursus/pelatihan kewirausahaan (keterampilan, manajemen dan pemasaran produk wisata) bagi masyarakat • Batuan permodalan untuk pengusaha kecil	Disbudpar, Disperindag, Dinas Koperasi, Dinas sosial, Kemenparekraf			

Sumber : Data Olahan Survey

PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa meskipun data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan namun kondisi eksisting menunjukkan bahwa obyek wisata Pantai Hunimua belum mengalami perkembangan yang berarti karena pengelolaan atraksi wisata, sarana dan fasilitas pendukung wisata belum dilakukan secara optimal.

Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku sebagai pengelola obyek wisata perlu melakukan langkah-langkah pengembangan dalam rangka pembenahan, perbaikan, penataan dan pembangunan kepariwisataan di Pantai Hunimua secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan keinginan pengunjung. Menurut Yoeti (2008) ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan obyek wisata agar dapat menjadi sebuah produk wisata yang berkualitas.

Faktor pertama adalah tersedianya daya tarik atau atraksi wisata (attraction). Kedua, adanya fasilitas yang memudahkan wisatawan untuk mencapai obyek wisata tersebut (aksesibilitas) dan faktor yang ketiga adalah amenities yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung wisata seperti penginapan, restoran atau rumah makan, wahana rekreasi atau hiburan, toko souvenir/cendera mata, petugas keamanan, dan fasilitas lainnya.

Oleh karena itu pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua perlu memperhatikan potensi daya tarik wisata lainnya seperti kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal, perbaikan dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana wisata yang secara signifikan akan merangsang minat wisatawan untuk berkunjung.

Dengan demikian proses pengembangan secara menyeluruh (komprehensif) akan menyentuh pada faktor-faktor atraksi wisata, amenities dan aksesibilitas yaitu pengembangan daya tarik wisata potensial antara lain pagelaran budaya daerah dan penyelenggaraan even-even bahari seperti kegiatan-kegiatan perlombaan. Kegiatan atau acara-acara seperti ini dapat menjadi pilihan daya tarik wisata bagi wisatawan untuk berkunjung. Selanjutnya

penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas wisata seperti air bersih, penginapan, hiburan, rumah makan (kuliner daerah), toko cendera mata, petugas keamanan dan kesehatan, wahana bermain (water park), peralatan wisata bawah air dan sampai kepada penyediaan kendaraan umum roda empat yang melayani rute Ambon-Pantai Hunimua untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan.

Dalam menyusun strategi pengembangan obyek wisata bahari Pantai Hunimua harus mengacu pada semua data hasil survey dalam penelitian ini baik data sekunder maupun primer sehingga dapat ditentukan hasil yang ingin dicapai. Pengembangan obyek wisata Pantai Hunimua pada dasarnya merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata sehingga dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal karena dapat menciptakan peluang berusaha baik dalam skala kecil maupun menengah, membuka lapangan kerja, menjadi pendorong bagi pengembangan sektor lain seperti industri dan perdagangan, sebagai upaya pelestarian lingkungan, dan diharapkan menjadi salah satu sektor pendukung pembangunan untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dan pendapatan perkapita masyarakat khususnya.

Marpaung (2002) juga mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan baik kepada wisatawan maupun warga setempat melalui keuntungan ekonomi. Baik dan buruknya pengelolaan obyek wisata Pantai Hunimua akan berpengaruh pada daya saingnya sebagai destinasi wisata bagi setiap wisatawan (lokal, domestik maupun manca negara), manfaat bagi masyarakat lokal serta keberlanjutan dari obyek wisata itu sendiri. Oleh sebab itu pengelolaannya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengakomodir berbagai masukan (aspirasi) dari pemangku kepentingan (stakeholder) sebelum melakukan pembangunan wisata.

Hal ini sangat penting agar pengembangannya dapat memberikan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi di masyarakat seperti permasalahan-permasalahan sosial dan budaya, ekonomi maupun lingkungan, mencerminkan keinginan pasar wisatawan yang potensial serta keterpaduan antara pembangunan daerah dengan zone pengembangannya.

Untuk mewujudkan pembangunan obyek wisata bahari Pantai Hunimua yang berkelanjutan serta mencerminkan adanya unsur keterpaduan antara berbagai elemen pembangunan maka perencanaan pengembangannya harus mengakomodir aspirasi semua pemangku kepentingan (stakeholder) seperti sektor pemerintah yang lainnya, pelaku usaha, lingkungan fisik maupun sosial, wisatawan, dan masyarakat (terutama masyarakat lokal) untuk berbagai tujuan: mencegah terjadinya konflik kepentingan, mendapatkan pasar wisatawan yang potensial sekaligus memberdayakan masyarakat agar terhindar dari upaya eksploitasi sebagai buruh yang hanya bisa bekerja pada pihak pengelola obyek wisata, akan tetapi menjadikan mereka juga sebagai mitra pengelola.

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan obyek wisata bahari Pantai Hunimua sebagai obyek wisata yang berdaya saing, mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah maka strategi pengembangannya adalah dengan mengakomodir aspirasi (kepentingan) berbagai stakeholder yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan memperhatikan asas keberlanjutan. Berdasarkan strategi pengembangan yang telah disusun maka Konsep Pengembangan

Obyek Wisata Bahari Pantai Hunimuadirumuskan dalam empat (4) kebijakan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan kualitas produk wisata.
2. Peningkatan peran pemangku kepentingan stakeholder.
3. Pengembangan lingkungan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, S., 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT. Pradya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, SP., Sitepu, MJ., 2013. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Balai Pustaka, Jakarta
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. CV Alfabeta. Bandung
- Rangkuti, F. (2002). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta. Bandung:
- Tuwo, A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir Dan Laut : Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Brilliant International. Surabaya.
- Yoeti, Oka. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.